

KSSK Berkomitmen Memperkuat Koordinasi Untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Meningkatnya Tekanan Global

Siaran Pers Nomor: 3/KSSK/Pers/2018

Jakarta, 31 Juli 2018 – Pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 bertempat di Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama Triwulan II tahun 2018 serta mempertimbangkan perkembangan hingga tanggal 20 Juli 2018, KSSK menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan Triwulan II 2018 tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan global.

KSSK memandang bahwa kondisi fundamental serta stabilitas perekonomian dan sistem keuangan masih terjaga. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang terjaga, likuiditas sistem keuangan yang mencukupi, cadangan devisa yang masih memadai, tingkat defisit APBN yang terkendali dan surplus keseimbangan primer, serta kinerja perbankan yang membaik, sebagaimana tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit dengan tingkat risiko kredit yang terkendali, serta permodalan dan likuiditas perbankan yang kuat. Namun, KSSK mencermati adanya tekanan pada nilai tukar dan SBN terutama yang berasal dari ekspektasi lanjutan kenaikan *Fed Funds Rate* dan sentimen dari perang dagang antara pemerintah AS dan mitra dagang utamanya.

Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global tersebut, KSSK telah melakukan asesmen dan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Di bidang moneter, BI memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam menjaga daya tarik pasar keuangan domestik sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI 7-day Reverse Repo Rate) dinaikkan sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada 29 Juni 2018, sementara pelonggaran kebijakan Loan to Value Ratio (LTV) dilakukan untuk mendorong sektor perumahan. Bank Indonesia juga terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Rupiah saat ini tercatat Rp14.420 per dolar AS atau melemah 6,0% ytd, lebih rendah dibandingkan pelemahan mata uang negara berkembang lainnya seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brazil, dan Turki.

Di bidang fiskal, Kementerian Keuangan terus meningkatkan kinerja APBN baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara maupun pembiayaan anggaran. Sampai dengan Semester I – 2018, Pendapatan Negara dan Hibah mencapai 44,0% dari target APBN 2018, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 41,5%. Capaian

tersebut ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 14% yoy dibandingkan Semester I – 2017. Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai 42,5% dari target APBN 2018, lebih tinggi dibandingkan 41,9% pada periode yang sama tahun 2017. Kualitas belanja akan difokuskan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat pondasi ekonomi. Defisit anggaran tercatat sebesar 0,74% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan defisit sebesar 1,29% terhadap PDB pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, di akhir Semester I – 2018 keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp10T, lebih baik dibandingkan defisit sebesar Rp66,8T pada Semester I - 2017. Memperhatikan kinerja anggaran tersebut serta perkembangan asumsi makro hingga saat ini, defisit pada akhir tahun 2018 diperkirakan 2,12% terhadap PDB, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 2,19%. Kementerian Keuangan optimis dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN sampai dengan akhir tahun.

Di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, OJK mencermati tekanan eksternal yang terjadi berpengaruh terhadap kinerja pasar keuangan domestik. IHSG sampai dengan akhir Triwulan-II secara umum mengalami pelemahan yang diiringi dengan aksi jual non-residen. Sementara itu, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan secara umum mengalami moderasi walau masih terjaga. Dari sisi risiko, OJK menilai risiko yang dihadapi lembaga jasa keuangan masih berada pada level yang manageable. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan posisi Juni 2018 tercatat sebesar 2,67% turun dari posisi Mei (2,79%) dan rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 3,15% sedikit meningkat dari posisi Mei (3,12%), Sementara itu, permodalan lembaga jasa keuangan (LJK) juga terjaga dengan CAR perbankan sebesar 21,9%, sedikit menurun dari posisi Mei (22,2%), namun jauh di atas threshold. Risk based Capital (RBC) asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 333% dan 455%, naik dari posisi Mei yang tercatat masing-masing sebesar 319% dan 442%. Kondisi likuiditas di perbankan juga masih memadai. Ekses likuiditas di perbankan per 18 Juli 2018 sebesar Rp539,9 triliun, yang ditunjukkan oleh alat likuid yang dimiliki perbankan, dinilai masih cukup untuk mendukung pertumbuhan. Angka pertumbuhan kredit pada posisi Juni 2018 tumbuh sebesar 10,75% yoy lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 7,75% yoy. Di pasar modal, penghimpunan dana s/d Juni 2018 mencapai Rp108 triliun. Emiten baru tercatat sebanyak 31 perusahaan yang jauh lebih besar dibanding posisi Januari - Mei 2018 sebesar 18 perusahaan. Total dana kelolaan investasi hingga Juni 2018 mencapai Rp706,2 triliun dibandingkan Juni 2017 sebesar 685,8 triliun.

OJK akan terus memantau dinamika perekonomian global dan dampaknya terhadap likuiditas pasar keuangan dan kinerja sektor jasa keuangan nasional dan akan mengambil policy measures yang tepat dalam hal tekanan di pasar keuangan terus berlanjut. Sementara itu dalam jangka menengah dan panjang OJK akan terus mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi melalui beberapa opsi kebijakan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan industri berorientasi ekspor, pembiayaan kepada proyek-proyek infrastruktur, dan dukungan pengembangan sektor pariwisata serta perumahan. OJK juga akan mengupayakan penguatan terhadap ketahanan pasar keuangan domestik antara lain melalui upaya pendalaman pasar



keuangan baik dari sisi permintaan maupun penawaran serta penguatan infrastruktur pasar.

Di bidang penjaminan simpanan, LPS akan terus mengamati tren yang terjadi pada wholesale funding perbankan dan terbuka untuk terus melakukan penyesuaian terhadap tingkat bunga penjaminan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga simpanan perbankan dan hasil evaluasi atas kondisi SSK.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini, KSSK memandang terdapat beberapa potensi risiko yang perlu dicermati baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, risiko bersumber dari spillover kenaikan lanjutan Fed Funds Rate dan perang dagang antara AS dan mitra dagang utamanya. Dari sisi domestik, menjaga keseimbangan antara defisit transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi, serta mengantisipasi perkembangan kondisi politik.

Dalam rapat ini, KSSK menerima laporan telah beroperasinya Sekretariat KSSK guna mendukung tugas dan wewenang KSSK yang terdiri atas perwakilan pegawai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Oktober 2018.

Untuk informasi lebih lanjut: sekretariatkssk@kemenkeu.go.id

